

BAB II KONDISI DALAM NEGERI IRAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang profil negara Iran yang meliputi sejarah Iran keadaan demografis dan geografis negara Iran, kondisi politik dalam negeri Iran yang meliputi kondisi ekonomi dan sistem pemerintahan Iran dewasa ini. Keadaan ini sangat penting untuk dipaparkan karena dari sini kita dapat mengetahui informasi dasar Iran yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang penulis sampaikan.

A. Kondisi Demografis dan Geografis Iran

Gambar 3 Peta Geografis Iran.



Source: Abrahamian, E. (2008). *A history of Modern Iran*. New York City: Columbia University Press.

Iran, yang dahulunya dikenal dengan nama Persia sampai pada 21 Maret 1935 Shah Reza Pahlavi merubahnya menjadi Iran yang memiliki maksud agar seluruh etnis atau keturunan di Persia bisa bersatu dan tidak berpecah-belah. Shah menganggap adanya nama Persia tersebut justru membuat rakyatnya menjadi terkotak-kotak antara etnis Kurds dan Turds masih susah untuk bersatu secara utuh dan memiliki rasa bersama. Nama Persia juga dianggap kurang baik karena memiliki konotasi yang bisa diartikan sebagai hal yang lemah yang mampu menghambat keberlangsungan dinasti yang ia pimpin di tengah-tengah besarnya ancaman penjajahan/imperialisme dari negara-negara Eropa. Sebagai gantinya, Shah memakai nama Iran yang memiliki arti tanah bangsa Arya sebagai sebuah cerminan dari kekuatan dan kemakmuran yang tentunya juga sebagai simbol kebangkitan, pemersatu dan pembangkit semangat seluruh rakyat Iran. Meski demikian, melalui sebuah revolusi, pada akhirnya nama Iran kembali berubah dan menjadi Republik Islam Iran pada tahun 1979 (Gunawan, 2016).

Posisi Iran sangat strategis dikelilingi oleh negara-negara penting di dunia seperti Rusia di utara, Turkmenistan di timur laut, Pakistan dan Afghanistan di sebelah timur, Turki dan Irak di sebelah barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan sebagai salah satu jalur perdagangan yang ramai di dunia. Posisinya yang strategis ini membuat Iran menjadi jembatan titik temu antara kawasan Asia Selatan, Rusia dan tentunya Timur-Tengah. Dapat dipastikan dengan adanya faktor geopolitik ini membuat apa yang terjadi di Iran, khususnya perubahan politik yang terjadi, mampu memengaruhi kondisi politik regional (Operation World, 2009).

Gambar 4 Fasilitas Nuklir Iran



Sumber: *New Scientist/ Global Security*

Daerah dataran tinggi mendominasi wilayah timur Iran, di beberapa daerah dataran di sana, ditemukan dataran yang mengandung garam serta gurun pasir yang luas. Pegunungan Zagros di wilayah barat dan pegunungan Elbruz di wilayah utara mengelilingi dataran tersebut yang membuat Iran menjadi salah satu negara dengan sumber energi minyak dan gas alam terbesar di dunia dan menyimpan uranium dalam jumlah yang banyak dan siap untuk diayak. Beberapa tempat pertambangan uranium Iran ditemukan di Provinsi Saghand, Provinsi Gachin.

Tak heran, minyak bumi dan gas alam menjadi komoditas ekspor yang sangat besar pengaruhnya bagi ekonomi Iran selain karpet, buah-buahan kering, kulit dan kaviar (Arungbudoyo, 2017). Selain melakukan ekspor tentunya Iran juga melakukan impor pada sektor mesin, logam industri, obat-obatan dan turunan kimia.

Meskipun Iran dikenal sebagai negara Republik Islam, di negara tersebut ada beberapa agama yang terus hidup. Sampai dengan tahun 2017, agama islam menjadi agama resmi

dan menjadi yang paling banyak dipeluk oleh warga negara Iran yaitu sebesar 99,4% yang terbagi ke dalam dua paham Shia 90-95% dan sunni sebesar 5-10%. Sementara itu, 0,3% adalah agama lain seperti Yahudi, Kristen dan beberapa agama lainnya dan 0,4% adalah yang tidak dispesifikasikan (Central Intelligence Agency, 2018).

B. Kondisi Politik Dalam Negri Iran

Dalam hal pemerintahan yang dijalankan oleh Iran saat ini, Iran dipimpin oleh seorang tokoh agama yang disebut dengan pemimpin agung Iran (*The Supreme Leader*) yang telah ditunjuk oleh Dewan Wali Iran yang berisikan kelompok umat islam dan seorang presiden yang menjadi kepala eksekutif dipilih melalui pemilu oleh rakyat Iran untuk jabatannya selama 4 (empat) tahun (National Geographic Kids, 2018). Pemimpin agung merupakan institusi yang paling dominan karena ia memiliki kewenangan yang banyak seperti melantik presiden, memilih Panglima Angkatan Bersenjata Iran dan juga bisa melakukan deklarasi perang dan damai serta mobilisasi angkatan bersenjata. Sedangkan, kewenangan seorang presiden Iran adalah memastikan konstitusi negara berjalan dengan baik lalu mempraktikkan kekuasaan eksekutif seperti diplomasi dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan kerjasama antar negara. Pada bidang legislatif, yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Islam yang juga disebut dengan parlemen Iran, memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan memiliki anggota sebanyak 290 anggota (BBC, 2009). Setiap undang-undang yang telah disahkan harus disetujui oleh Dewan Wali untuk memastikan undang-undang ini telah selaras dengan prinsip-prinsip islam.

Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979 membuat perubahan yang sangat signifikan bagi dunia perpolitikan di republik Islam ini. Perubahan yang sering disebut sebagai sebuah reformasi dan demokratisasi ini membuat Iran menjadi negara yang terbuka terhadap isu agama dan isu negara. Setelah terjadi revolusi ini, kondisi perpolitikan dalam negeri terbilang dinamis. Apa yang terjadi dengan keadaan politik dalam negeri tersebut tidak lepas dari adanya dua kubu, kubu konservatif dan kubu moderat, yang sangat berkuasa dan saling berebut kekuasaan di bidang legislatif dan eksekutif. Salah satu hal yang seringkali dipermasalahkan oleh kedua kubu ini berkaitan dengan program nuklir yang dimiliki oleh Iran. Kedua kubu selalu berebut pengaruh dan saling mempengaruhi dalam setiap kebijakan program nuklir yang dimiliki oleh Iran. Hal ini tidak mengherankan karena memang pada dasarnya kedua kubu ini sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kaum konservatif tidak ingin dominasi mereka di pentas politik diambil oleh kekuatan politik baru dari kaum reformis. (KOMPAS, 1999)

Setiap kali terjadi perubahan politik pemerintahan di Iran, kebijakan program nuklir Iran ini dapat berubah sesuai dengan siapa yang berkuasa pada saat itu. Akan tetapi, secara garis besar memang kita dapat melihat bahwa arah perpolitikan ini dapat membuat kemajuan program nuklir Iran.

Gambar 5 Muhammad Khatami dan Ali Akbar Nateq- Nouri



Sumber: al-monitor.com (Faghihi, 2014)

1. Kubu Konservatif

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konservatif adalah suatu sikap yang mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi yang berlaku. Kaum konservatif berisikan para golongan yang menganggap dirinya sebagai pewaris Ayatullah Khoemini, juga memiliki tokoh semisal Ali Akbar Nateq-Neuri dan tentunya pemimpin Spiritual Iran Ayatullah Ali Khamenei. Secara umum, kaum konservatif ini adalah generasi pertama sewaktu adanya revolusi Iran, mereka adalah orang-orang yang pada saat itu memiliki peranan penting dalam revolusi karena mereka memiliki pemikiran bahwa islam dapat membutuhkan kemenangannya atas faksi-faksi pendukung Barat yang ada di Iran (Kompas, 2010).

Dalam hal perpolitikan Iran ini dapat dikatakan bahwa para penganut konservatimisme ini sangat

menjaga nilai-nilai yang ada di dalam negeri Iran utamanya pasca revolusi Iran tahun 1979. Bagi kubu ini, kedaulatan Tuhan harus menjadi pijakan dalam konsep bernegara yang diimplementasikan ke dalam konsep Wilayah al-faqih. Kaum konservatif sangat tegas dalam pemahaman ini dengan menegaskan bahwa negeri ini harus dipimpin oleh kekuatan yang sakral yaitu dengan adanya ulama sebagai representasi dari Tuhan. Para ulama inilah yang akan menjadi pengendali dalam setiap kebijakan negara meskipun kedaulatan rakyat tetap dihormati dan diakui dengan adanya pemilihan umum yang dapat memilih anggota parlemen dan presiden. Namun, tetap saja kedaulatan rakyat tersebut haruslah mengutamakan kedaulatan Tuhan. Karena inilah kaum konservatif sangat anti terhadap Barat beserta westernisasi dan sekularisasi karena dianggap sebagai anti Tuhan. Kaum konservatif memiliki pandangan bila yang disampaikan oleh Barat hanyalah bualan belaka dan selalu memiliki tujuan untuk mengkerdikan umat islam.

Pada era sebelum pemilihan presiden 1997 yang dimenangkan oleh Muhammad Khatami, kaum konservatif sangat berjaya dan menguasai jalannya pemerintahan di Iran dengan selalu menentang kebijakan atau golongan yang cenderung pro terhadap Barat. Salah satu buktinya adalah dengan dicopotnya Muhammad Khatami sebagai menteri kebudayaan dan perlindungan islam karena dianggap tidak mampu membendung invasi kebudayaan asing dan Barat melalui film produksi luar dan buku-buku yang membahas tentang demokrasi serta pembaharuan (Fetini, 2009).

2. Kubu Moderat/Reformis

Persaingan kaum konservatif dan reformis berawal saat pemilihan presiden terjadi di tahun 1997 di mana secara mengejutkan Muhammad Khatami yang berasal dari kaum reformis berhasil mengalahkan Ali Akbar Nateq-Nouri. Pada saat itu, Muhammad Khatami menang dengan 69,07% suara dan Ali Akbar Nateq-Nouri mendapatkan 24,91% suara (Abrahamian, 2008). Sejak saat itulah, mulai muncul persaingan yang terlihat antara kaum konservatif dengan kaum reformis.

Kaum reformis ini berisikan aliran kiri islam yang memiliki cara pandang yang sedikit berbeda dengan kaum konservatif. Mereka memandang bahwasannya negara Iran harus terbuka terhadap kemajuan Barat. Mereka juga memandang bahwa kekuasaan Mullah melalui konsep Wilayah al-faqih yang dipopulerkan oleh Ayatullah Khomeini ini telah mereduksi kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi oleh demokrasi. Mereka merasa hak-hak dasar rakyat telah dikebiri oleh kekuasaan Mullah untuk ikut aktif dalam berpartisipasi dalam menentukan kebijakan di negri mereka. Para Mullah ini bukannya tanpa alasan dalam melakukan hal tersebut karena pada dasarnya kaum konservatif menganggap para Mullah ini mendapatkan petunjuk dari Tuhan sehingga terkadang kepentingan rakyat seolah terabaikan.

Tokoh yang terkenal dari kaum reformis ini diantaranya ada Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Muhammad Khatami, Atallah Muhajani (Mentri Kebudayaan di era presiden Khatami). Dari nama-nama di atas, Rafsanjani dan Muhammad Khatamilah yang paling berpengaruh dalam kaum reformis ini.

Rafsanjani adalah mantan presiden Iran yang menjabat dalam periode 1989-1997. Meskipun dia ikut berperan penting pada saat revolusi Iran 1979, namun nyatanya ia bertolak belakang dengan kaum konservatif. Bahkan pemimpin Agung Iran, Ayatullah Ali Khamenei juga mengakui bahwasannya perbedaan antara keduanya sangat terlihat (BBC, 2017).

Pada awal munculnya kaum ini mereka belum mendominasi jalannya perpolitikan di Iran. Namun, setelah terjadinya kemenangan Khatami atas Ali Akbar ini perlahan mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Meskipun demikian, dengan hadirnya dominasi kaum konservatif di parlemen membuat Khatami tidak bisa bebas dalam menjalankan kepemimpinannya. Kaum konservatif terus saja mendikte kepemimpinannya dari berbagai bidang.

C. Ekonomi Negara Iran Sebelum Embargo

Iran menggunakan mata uang Rial Iran sebagai alat tukarnya. Di bidang ekonomi, ekonomi Iran termasuk salah satu negara yang memiliki perekonomian yang mandiri. Dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, Iran dapat memproduksi makanannya sendiri dan tentunya dapat memproduksi energi, baik itu yang berasal dari minyak bumi maupun dari gas alam (Sari, 2013). Bahkan, Iran adalah negara berperingkat kedua dengan tingkat perekonomian kedua terbesar di Timur Tengah dan daerah Afrika Utara dengan GDP mencapai 598 miliar dolar Amerika pada tahun 2012 (Central Intelligence Agency, 2018). Pada tahun 2009 sebelum embargo diterapkan, pendapatan per kapita Iran sebenarnya cukup tinggi di angka 5,619.12 USD sehingga membuat Iran menjadi salah

satu negara yang kaya dengan populasinya yang mencapai angka 73.14 juta jiwa (Trading Economics, 2018).

Iran dipercaya masih memiliki cadangan minyak yang sangat melimpah disusul dengan pasokan gas alamnya. Hingga kini, Iran memiliki cadangan gas alam kedua terbesar di dunia disusul dengan cadangan minyak bumi yang menempati keempat terbesar di dunia (Republika, 2015). Kedua sektor ini menjadi andalan bagi perekonomian Iran. Selain dua sektor tersebut, Iran juga menggerakkan sektor perekonomiannya melalui batu bara, timah hitam, tembaga, biji besi, bahan baku semen, krom, seng dan marmer (Kemlu, 2018).

Tercatat pada tahun 2009 kondisi ekspor-impor Iran mengalami kondisi surplus dimana ekspor Iran mencapai USD 70.16 juta sedangkan impor berkisar USD 57.16 juta. Penjualan petroleum masih mendominasi ekspor Iran sedangkan impor Iran berasal dari produk industri bahan mentah, barang setengah jadi dan juga bahan makanan. Iran memang masih bergantung pada luar negeri pada beberapa sektor seperti besi baja. Meskipun Iran mengalami surplus perdagangan, hal ini tidaklah menyehatkan bagi perekonomian mengingat ekspor minyak bumi masih mendominasi ekspor Iran.

Pada tahun 2010 produksi minyak Iran mencapai 3,54 juta barel per hari. Produktivitas eksplorasi minyak bumi ini masih terus berlanjut hanya sampai dengan dua tahun ke depan karena pada tahun 2012 Amerika Serikat menjatuhkan sanksi Iran yang sangat mengganggu ekspor-impor Iran khususnya pada sektor minyak ini. Bahkan terjadi penurunan produksi menjadi 2,5 juta bph sampai kepada 1,4 juta bph (Trading Economics, 2018).

Satu sektor lagi yang merupakan penopang ekonomi Iran adalah gas alam. Iran memiliki cadangan gas alam kedua

terbesar di dunia setelah Rusia. Dari total rata-rata produksi gas alam sekitar 10%, Iran hanya menghabiskan 5% nya saja. Dari jumlah tersebut, berdasarkan laporan keuangan Iran, Iran telah mengekspor jumlah harian rata-rata lebih dari 30 juta meter kubik gas alam hanya ke satu negara Turki saja. Hal ini menunjukkan pertumbuhan harian dari 11 juta meter kubik apabila dibandingkan dengan data di tahun 2010. Pada tahun 2009, Iran telah mengekspor rata-rata 21 juta meter kubik gas alam ke Turki setiap harinya dengan nilai hampir 7 miliar rupiah (Amrullah, 2012).